BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Dalam UU NO 6 Tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2 Pemerintah Desa

2.2.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).pemerintah desa atau yang di sebut dengan nama lain Perangkat Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penyelenggara pemerintah desa.

2.2.2 Kepala Desa

Pejabat pemerintah yang mempunyai wewenang menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan kemasyarakatan dan memiliki wewenang:

- a. Penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Mengajukan rancangan praturan desa.
- c. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBD desa untuk di bahas dan di tetapkan bersama.
- e. Membina kehidupan masyarakat desa.
- f. Mengkordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- g. Membina prekonomian desa.

2.2.3 Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang di tetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. anggota BPD terdiri dari ketua Rukun Warga, dan pemangku rakyat, golongan, profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka lainnya.

BPD Berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD mempunyai wewenang :

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- c. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa
- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ,BPD mempunyai hak

- a. Meminta keterangan pemerintah desa
- b. Menyatakan pendapat

Sementara anggota BPD mempunyai hak, antara lain :

- a. Mengajukan rancangan peraturan desa
- b. Mengajukan pertanyaan
- c. Menyampaikan usul dan pendapat
- d. Memilih dan di pilih

2.2.4 Perangkat Desa

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dengan demikian perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, perangkat desa lainnya terdiri dari :

- a. Sekretariat desa
- b. Pelaksanaan teknis lapangan
- c. Unsur kewilayahan

Jumlah perangkat desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan yaitu :

- a. Berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat
- b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan
- c. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan bidang perencanaan
- d. Mempunyai pengalaman di bidang perkantoran
- e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat, dan
- f. Bersedia tinggal di desa yang bersangkutan

Sekertaris desa di angkat oleh sekertaris Daerah Kabupaten/Kota atas Nama Bupati/WaliKota. Perangkat desa lainnya di angkat oleh kepala desa dari penduduk desa dan keputusan kepala desa. Usia perangkat desa paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

2.3 Pembangunan Desa

2.3.1 Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah Merupakan proses perubanan yang disengaja dan direncanakan lebih Lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau Direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehandaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umum- nya dipadamkan dengan istilah developmen, sekalipun istilah developmen sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan.¹

Maka pcmbangunan masyarakat desa juga disebut *rurar development*. Demikian pula istilah modemisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pungetahnan dan teknologi modem pada berbagai segi atau bidang kchidupan masyarakat. Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pcm- bnnngunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan. perubahan sosial melalui modemisasi.

Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkembangan yang terjadi pada ntasyarakat termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan Pemerintah. Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merekayasa

¹ Rudy.*Hukum pemerintahan Daerah*.Op.Cit.Hlm 56.

perubahan adalah Negara, Campur tangan Negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal. Istilah dan pengertian pembangunan tersebut di atas tidak lazim bagi Daerah yang telah maju dan modern. Hal ini dapat dimengerti karena proses modernisasi di Barat merupakan proses perkembangan (*development*) internal dan wajar lewat industri dengan sistem kapitalisasinya.

Proses ini bersifat wajar dalam arti tidak ada perencanaan, pengendalian, atau kesengajaan terhadap jalannya proses tersebut. Peran Pemerintah bersifat pasif. Kalau ada yang dapat diperhitungkan sebagai kekuatan pengendali yang aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Modernisasi ini, dengan industri dan system. Kapitalisme yang melandasainya, telah mengantarkan negara-negara tersebut ke tingkat kemajuan yang telah dicapainya sejauh ini. Bagaimana dengan dunia Ketiga, termasuk Indonesia? Mengapa pembangunan diperlukan? Hal ini mudah dimengerti. Sebab, Negara-negara berkembang semenjak memperoleh kemerdekaannya merasa bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Hal yang segera dirasakan adalah keterbelakangan dan ketertinggalannya dari dunia Barat.

Maka untuk memajukan Negara dan sekaligus untuk mengejar ketertinggalan itu proses modernisasi yang biasa tidaklah cukup.

Moderenisasi itu harus direncanakan, dipacu, dan diakselerasikan, sedemikian rupa sehingga ibarat kendaraan segala bisa mengantar negara-negara berkembang tersebut menjadi negara yang maju dan sejahtera setara dengan dunia Barat.

Pembangunan secara umum mengandung pengertian semacam ini. Bagaimana kegiatan pembangunan nasional di Indonesia? Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa pembangunan adalah merupakan kegiatan yang direncanakan.

Oleh negara atau khususnya pemerintah Di Indonesia kegiatan pembangunan nasional secara berencana telah dilancarkan semenjak tahun 1950-an, khususnya lewat peran Dewan Perancang Nasional (DEPPERNAS) yang memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi.

Dengan demikian, pembangunan nasional telah dilancarkan semenjak jaman Orde Baru, hingga sekarang. Bagaimana rumusan pengertian pembangunan nasional kita? Diawali dengan penugasan Deppernas oleh Presiden untuk "merancang pola masyarakat adil dan makmur."²

Tujuan dalam arti luas mempengaruhi masyarakat agar mengikuti keinginan pemerintah, dalam hal :

- a. Mengarahkan aktifitas tertentu.
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan .
- c. Keinginan melindungi suatu objek tertentu.
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit.
- e. Mengarahkan dengan menyeleksi orang-orang dan aktifitas-aktifitas.

² Ibid.Hlm.22

Secara umum tujuan dan fungsi dari pembangunan desa adalah untuk pengendalian dari pada aktifitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman yang harus dilaksanakan oleh baik yang berkepentingan pejabat yang berwenang. Selain itu, tujuan dari pembangunan desa itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu :

a. Dari Sisi Pemerintah

Dari sisi pemerintah tujuan pembangunan Desa adalah:

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir, sehingga sasaran bisa tepat, benar-benar berdaya guna dan berhasil guna.

b. Dari Sisi Masyarakat

Dari sisi masyarakat tujuan pembangunan desa adalah:

1. Untuk kemakmuran rakyat.
2. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
3. Untuk memudahkan mendapatkan ekonomi masyarakat.

Dalam hal pembangunan desa, tujuan pembangunan desa adalah untuk melindungi kepentingan baik kepentingan pemerintah maupun kepentingan masyarakat yang lebih maju.

Adapun masalah-masalah pembangunan desa yang ada di daerah adalah dapat berupa sistem perencanaan pembangunan desa dan tuntutan masyarakat, sarana dan prasarana pendukung, sumber daya manusia yang dibutuhkan, dan soal ketersediaan dana.

a. Sistem pembangunan dan pemenuhan kompetensi

Sistem yang digunakan dalam perencanaan pembangunan dapat berbeda di daerah lain. Suatu sistem selalu diikuti oleh struktur dan eksistensi kelembagaannya.

Apabila sistem yang dipilih dalam perencanaan pembangunan bersifat persial-sektoral, maka tuntutan terhadap adanya kelembagaan yang memberikan wadah penanganan terpadu belum mendesak. Apabila sistem yang dipilih dalam pembangunan terpadu mau tidak mau harus ada lembaga yang secara khusus sistem pembangunan desa. Adanya kelembagaan yang baru dibentuk sering sekali membawa konsekuensi yang tidak sedikit.

Bahkan konsekuensi itu sudah terasa sebelum institusi tersebut benar-benar terbentuk.

b. Kondisi dan Tuntutan Masyarakat

Di daerah-daerah tertentu frekuensi perencanaan pembangunan dan pemenuhan kompetensi rendah, pemerintah daerah tidak terlalu terbebani untuk memikirkan waktu penyelesaian dan prioritas penyelesaian pembangunan desa pada desa tersebut, sedangkan daerah-daerah yang tingkat kompetensi dan pembangunannya sangat tinggi mau tidak mau harus ada solusi untuk menanganinya. Masyarakat tentu menginginkan izin yang cepat, murah, dan segera dapat dimanfaatkan. Harus diingat bahwa instansi yang menangani perencanaan pembangunan tidak bekerja sendirian, tidak jarang mereka harus berkoordinasi dengan instansi lain. Hal itu yang mungkin kurang dipahami oleh warga masyarakat.

c. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan prasarana pendukung kegiatan untuk menjalankan sistem perencanaan pembangunan cukup banyak. Apabila perencanaan pembangunan dilakukan oleh satu dinas banyak pula sarana dan prasarana

yang dibutuhkan. Belum semua daerah dapat mewujudkan harapan dari tuntutan ideal mengenai sarana dan prasarana.

d. Sumber Daya Manusia

Keluhan yang banyak terdengar di kantor pemerintahan daerah adalah soal sumber daya manusia yang ada. Banyaknya pegawai pemerintah daerah tidak menjamin bahwa pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab di instansi itu akan beres. Kenyataan tersebut tidak jarang disebabkan rekrutmen atau karena ada kebijakan di bidang kepegawaian kurang tepat.

e. Ketersediaan Dana

Kesuksesan yang dialami oleh sejumlah pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada warganya memang layak mendapatkan apresiasi, tapi tidak semuanya dapat berjalan mulus. Idealisme yang bagus dalam perencanaan pembangunan tidak akan berjalan tanpa ketersediaan dana yang memadai. Oleh karena itu, hal ini menjadi persoalan tersendiri. Disamping persoalan-persoalan tersebut ada potensi permasalahan dalam perencanaan pembangunan. Soal tarik menarik kepentingan antar daerah dan pusat merupakan persoalan yang sering terjadi. Persoalan yang tidak melihat ke depan dalam jangka panjang.³

³ Kusworo, *Kajian Tentang Perubahan Pemerintahan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 1974*, hlm .67

2.3.2 Tujuan Pembangunan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah UU No 6 Tahun 2014, tentang Desa yaitu;

“Pembangunan desa adalah merupakan proses perubahan yang disengaja dan direncanakan lebih lengkap lagi, pembangunan berarti perubahan yang disengaja atau direncanakan dengan tujuan untuk mengubah keadaan yang tidak dikehendaki ke arah yang dikehendaki. Istilah pembangunan umumnya dipadankan dengan istilah *development*, sekalipun istilah *development* sebenarnya berarti perkembangan tanpa perencanaan. Maka pembangunan masyarakat desa juga disebut *rural development*.”

Demikian pula istilah modernisasi juga sering diartikan identik dengan pembangunan, yakni mengingat artinya sebagai proses penerapan pengetahuan dan teknologi modern pada berbagai segi atau bidang kehidupan masyarakat.⁴ Sehingga, ada pula yang mendefinisikan pembangunan sebagai usaha yang dilakukan secara sadar untuk menciptakan perubahan sosial melalui modernisasi. Di negara-negara berkembang, proses perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat termasuk masyarakat desa tidak lepas dari campur tangan Pemerintah.

Dengan demikian jelas bahwa yang merencanakan dan merencanakan perubahan adalah negara, campur tangan Negara ini dilakukan dengan tujuan untuk mempercepat akselerasi pembangunan agar bangsanya tidak tertinggal dari dunia barat. Istilah dan pengertian pembangunan tersebut di atas tidak lazim bagi negara-negara industri barat yang telah maju dan modern. Hal ini dapat

⁴ *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, Volum I, Edisi Ke-3 2004, hlm. 22

dimengerti karena proses modernisasi di Barat merupakan proses perkembangan (*development*) internal dan wajar lewat industri dengan sistem kapitalisasinya.

2.3.3 Tata Cara Pembangunan Desa

1. Wajib disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.
2. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Desa.

Desa yang terencana dalam suatu kecamatan dengan prasarana lingkungan berupa daerah yang dapat menunjang perencanaan pembangunan yang ada di daerah tersebut .

Untuk pembangunan pembangunan desa yang lebih maju dan sejahtera perlu adanya kerja sama dalam perencanaan pembangunan dengan adanya kerja sama masyarakat desa setempat, dimana masyarakat adalah suatu peran penting dalam pembangun desa yang telah terencanakan.

2.4 Pengertian Pemenuhan Kompetensi

2.4.1 Pemenuhan

Yaitu hak untuk Meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran bagi aparatur pemerintah, sekolah dan masyarakat luas dalam memahami pemenuhan hak atas pendidikan inklusif di Indonesia dan juga menyediakan informasi bahwa setiap manusia berhak sebagai peserta didik yang memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

2.4.2 Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut .

Kompetensi merupakan karakteristik individu yang mendasari kinerja atau perilaku ditempat kerja.

Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik orang dan mengindikasikan cara berperilaku atau berpikir, menyamakan situasi, dan mendukung untuk periode waktu yang lama.

Kompetensi sebagai kemampuan seseorang untuk menghasilkan pada tingkat memuaskan di tempat kerja, secara garis besar, Kompetensi menjelaskan apa yang dilakukan orang di tempat kerja pada berbagai tingkatan dan memperinci standard masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik pengetahuan dan ketrampilan yang diperlukan individual yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif sehingga mencapai standard kualitas profesional dalam bekerja.

Terdapat lima tipe karakteristik kompetensi :

- a. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan.
- b. Sifat adalah karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi.
- c. Konsep diri, adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang

- d. Pengetahuan, adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik
- e. Keterampilan, adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu

Terdapat lima kategori kompetensi, yaitu :

1. *Task Achievement*

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja yang baik. Kompetensi berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh orientasi pada hasil, mengelola kinerja, mempengaruhi, inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.

2. *Relationship*

Kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi, memiliki hubungan kerja yang baik dengan orang lain. Kompetensi ini meliputi: kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antar pribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

3. *Personal Attribute*

Kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Kompetensi ini meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, keteguhan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.

4. *Managerial*

Kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pebelolaan , pengawasan, dan mengembangkan orang. Kompetensi manajerial berupa; memotivasi, memberdayakan/empowering, dan mengembangkan orang lain.

5. *Leadership*

Kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi ini meliputi; Kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasi, membangun fokus dan maksud, nilai-nilai.

2.4.3 Pemenuhan Kompetensi

Kompetensi kepala desa, didefinisikan sebagai kemampuan kepala desa dalam menghimpun, menggerakkan dan mengarahkan potensi-potensi dalam masyarakat desa yang dipimpinnya untuk kepentingan pembangunan desa. Kompetensi kepala desa tersebut dilihat/diamati dari indikator sebagai berikut; Kemampuan pengetahuan, dilihat dari luasnya pengetahuan kepala desa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan, Kemampuan ketrampilan/keahlian, dilihat dari kemampuan kepala desa dalam mengelola pembangunan desa (menyusun program, membuat perencanaan program, merancang implementasi program, mengawasi dan mengevaluasi program), kemampuan manajerial, dilihat dari kemampuan kepala desa dalam memimpin dan menggerakkan bawahan/perangkat desa dan masyarakat, kemampuan interpersonal, dilihat dari kemampuan kepala desa dalam mengambil keputusan, berintegrasi dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, memotivasi dan melakukan persuasi terhadap masyarakatnya.

Asas dari perencanaan pembangunan berlandaskan pada asas manfaat, asas usaha bersama, asas demokrasi, asas adil dan rata, dan juga memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan rumah sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- b. Mewujudkan pembangunan yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur.
- c. Memberi arahan pada pertumbuhan wilayah dan persebaran penduduk yang rasional.
- d. Menunjang pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lain.⁵

Pemenuhan Kompetensi adalah suatu kemampuan kepala desa dalam melakukan perencanaan pembangunan desa, dimana tugas dan wewenang kepala desa dapat menjadikan suatu partisipasi masyarakat dalam melakukan pembangunan desa yang menjadikan desa tersebut memiliki kualitas dalam melakukan pembangunan.

⁵ Wajong. J. *Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah*, Jembatan, Jakarta, 1973, hlm. 78

2.4.4 Tujuan Pemenuhan Kompetensi

Bertujuan untuk memimpin dan menggerakkan bawahan/perangkat desa, lembaga lembaga masyarakat desa dalam rangka kepentingan pembangunan desa. Selanjutnya untuk mengetahui hasil perhitungan rata-rata pada semua aspek kemampuan manajerial pada masyarakat dalam pembangunan desa, serta memberikan indikasi bahwa kemampuan manajerial kepala desa dalam memimpin dan menggerakkan perangkat desa, lembaga-lembaga masyarakat desa, dan warga masyarakat desa untuk kepentingan pembangunan desa dapat dikatakan cukup tinggi.

2.5 Dasar Hukum Pemerintahan Desa

Adapun dasar hukum yang berkaitan dengan peraturan keterangan rencana pembangunan desa adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa.